

## Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

**Rahima Br. Purba**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Jln. Gatot Subroto Km. 4,5 Kec. Medan Sunggal 20122

Korespondensi: [rahima@pancabudi.ac.id](mailto:rahima@pancabudi.ac.id)

**Azima Mendina Amrul**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Jln. Gatot Subroto Km. 4,5 Kec. Medan Sunggal 20122

DOI: <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar. Sampel penelitian ini adalah pegawai pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai BKD. Data dalam penelitian ini adalah data primer, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisa yang digunakan adalah model Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

**Abstract :** *This research aims to examine the effect of implementing regional financial accounting system, public transparency and control activity on regional financial accountability on regional Finance Agency (BKD) Regency of flat land. This research sample is an employee of the District Financial Agency (BKD) of the District flat land. The sampling technique in this study is Purposive Sampling. The samples in this study were several employees of BKD. The data in this study is primary data, data collected using questionnaires shared directly with respondents. The method of analysis used is a model of double Linear regression. The results of research and hypothesis testing showed that the regional financial accounting system, public transparency and control activity had no significant effect on the Accountability of regional Finance.*

**Keywords:** *Accountability, transparency, activity control and regional financial accounting system*

**Cara Sitasi :** Br. Purba, Rahima., Azima Mendina Amrul, (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 140-152. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308>

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidak adanya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah.

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum.

Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, dalam proses perumusan kebijakan, adapun cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalisir. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah mengubah pola pertanggungjawaban kepada para pemilikinya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung.

Berdasarkan Hal itu peneliti berencana akan melakukan penelitian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) di Kabupaten Tanah Datar. Salah satu kebijakan Kabupaten Tanah Datar dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Salah satu tujuan pembentukan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset ini adalah agar Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dilakukan secara terpadu sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pendapatan Daerah.

Dalam rangka efektifitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan penyempurnaan dan penataan organisasi Perangkat Daerah (SKPD), maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah dirubah dengan peraturan Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kepala Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan aset dikelola dengan baik.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008.

## RUMUSAN MASALAH

- Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar?
- Apakah Transparansi Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar?
- Apakah Aktivitas Pengendalian Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar?

## KAJIAN PUSTAKA

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa system pencatatan yang dapat digunakan. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu *Single Entry*, *Double Entry* dan *Triple Entry*.

### Transparansi Publik

Menurut Hari Sabarno (2007: 38), "Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik". Perwujudan tata pemerintahan yang baik mengisyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga dibuka terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas

pemerintah adalah menjalankan amanat. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Dwiyanto (2006: 80) mendefinisikan, “Transparansi sebagai penyediaan informasi pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi–informasi yang akurat dan memadai”.

Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

- 1) Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain.
- 3) Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak Negara mengklasifikasi catatan atau laporan sebagai *Top Secret*, *Secret Confidential* dan *Restricted*. Sedangkan *Official Secrets Acts* membantu *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*.

## Aktivitas Pengendalian

Mardiasmo (2009: 2) menjelaskan, “Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan”. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undangan–undangan, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi:

- a. Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup.
- b. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai.
- c. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan.
- d. Evaluasi secara independen atas kinerja.
- e. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keuangan. Pengendalian pemrosesan informasi digolongkan menjadi dua yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
- f. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan.

Didalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati–hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal dan tepat waktu.

## Akuntabilitas Keuangan

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak–pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah harus dapat menjadi subyek atas pemberian informasi dalam rangka memenuhi hak–hak publik yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya.

Mardiasmo (2009: 18) dalam bukunya menyebutkan, “Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Secara umum Akuntabilitas dipahami sebagai:

- a. Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan laporan yang memuaskan atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki/diterima (*satisfactory report*).
- b. Pengukuran tanggungjawab yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya (*responsibility*).
- c. Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan (hukum, persetujuan atau kebiasaan).

Mengacu pada pemahaman diatas, makajelas bahwa akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari responsibilitas, karena dalam akuntabilitas terkandung dimensi kepuasan daripara pihak (*stakeholders*) yang telah memberikan wewenang kepadanya, serta adanya kewajiban membuktikan bahwa kinerja yang dicapai atas penggunaan wewenang tersebut telah sesuai dengan standard yang telah disetujui sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Februari 2017, berikut adalah rincian waktu penelitian.

### **Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data**

#### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposif*, yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah data primer, data yang diperoleh/dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang bersifat *up to date*.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam mengumpulkan data-data, pelaksanaan penelitian di lapangan dilakukan dengan Teknik Observasi, Teknik Angket dan Teknik Studi Literatur.

#### **Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh digunakan metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis Regresi Berganda dengan di olah menggunakan SPSS.

## **METODE ANALISIS DATA**

### **Uji Kualitansi Data**

Untuk melakukan uji kualitas data dalam pengolahan data penelitian ini, maka peneliti menggunakan uji Validitas dan Reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heterokedastisitas.

## Regresi Linier Berganda

Persamaan regresinya adalah :  $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$

Dimana :

Y	= Akuntabilitas Keuangan
$\beta_0$	= Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
X1	= Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
X2	= Transparansi Publik
X3	= Aktivitas Pengendalian
e	= Error

## Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah Uji Parsial (Uji t), dan Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas instrument dengan menggunakan *software statistic Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), nilai validitas ditunjukkan pada kolom *Corrected Item Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r-hitung. r-tabel) maka instrument tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar item pertanyaan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r-hitung lebih besar dari r-tabel maka dengan df 39 (40-1) berarti r-tabel adalah 0,3081 sebagaimana dapat digambarkan pada tabel 1

**Tabel 1 Uji Validitas Variabel**

No	Variabel	Butir Instrumen	Korelasi (r)	r-Tabel	Kriteria	Ket
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	SAKD 1	0,536	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		SAKD 2	0,800	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		SAKD 3	0,817	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		SAKD 4	0,769	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		SAKD 5	0,806	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		SAKD 6	0,623	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		SAKD 7	0,722	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
2	Transparansi Publik (X2)	TP 1	0,513	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		TP 2	0,383	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		TP 3	0,610	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		TP 4	0,363	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		TP 5	0,529	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		TP 6	0,750	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		TP 7	0,310	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
3	Aktivitas Pengendalian (X3)	AP 1	0,608	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AP 2	0,559	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AP 3	0,552	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AP 4	0,629	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AP 5	0,788	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AP 6	0,581	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AP 7	0,683	0,3081	rhitung>rtabel	Valid

4	Akuntabilitas Keuangan (Y)	AK 1	0,817	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AK 2	0,851	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AK 3	0,892	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AK 4	0,803	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AK 5	0,825	0,3081	rhitung>rtabel	Valid
		AK 6	0,750	0,3081	rhitung>rtabel	Valid

Sumber: Penulis, Hasil Pengolahan Data SPSS. 17 (2017)

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa item pertanyaan variabel-variabel penelitian mempunyai nilai korelasi ( r ) yang lebih besar dari r-tabel yaitu 0,3081 kecuali untuk pertanyaan variabel Akuntabilitas Keuangan yaitu T7. Item pertanyaan variabel-variabel penelitian yang valid dapat digunakan pada analisis selanjutnya, sementara item pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak digunakan dalam analisis selanjutnya.

### Uji Realibilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Suatu Kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu instrument dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai 0,6 maka instrument yang digunakan reliabel. Tabel 4.2 berikut ini dapat dilihat bahwa Variabel X1, X3 dan Y dalam penelitian ini reliabel sedangkan Variabel X2 dalam penelitian ini tidak reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach's Alpha > 0,6.

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas**

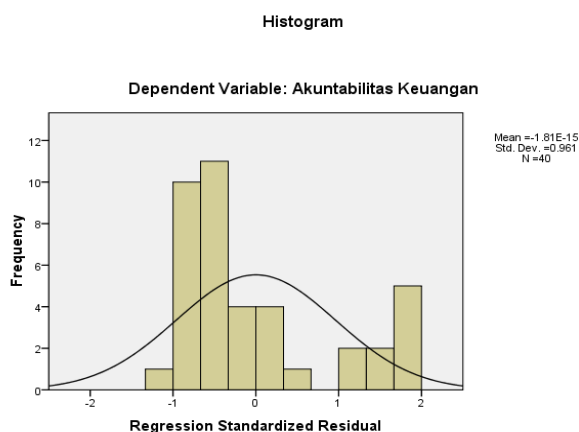
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(X1)	0,847	Reliabel
Transparansi Publik(X2)	0,494	Tidak Reliabel
Aktivitas Pengendalian(X3)	0,746	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan(Y)	0,879	Reliabel

Sumber: Penulis (2017)

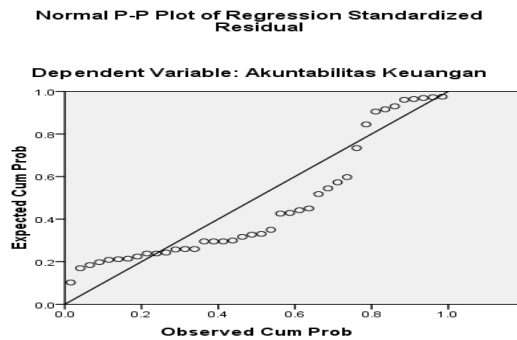
### Pengujian Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas dapat dilihat melalui grafik Histogram dan grafik P-P Plots. Pada uji grafik, data yang memiliki pola statistik lonceng pada diagram histogram dan pada grafik P-P Plots titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal merupakan data yang baik. Berikut ini hasil uji normalitas berdasarkan grafik.



**Gambar 1 Grafik Histogram**



**Gambar 2 Normal P-P Plot**

Dilihat dari grafik Histogram dan grafik P-P Plot diatas maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena data memiliki polayang seperti lonceng pada diagram histogram dan pada grafik P-P Plots titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal.

### Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi diantara variabel bebas. Multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai *tolerance/Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai *tolerance* lebih bebas dari masalah multikolinieritas.

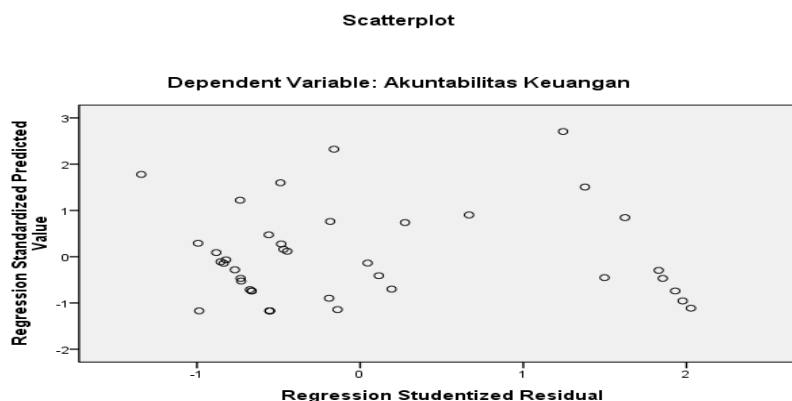
**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Colenearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,800	1,1250	Tidak Multikolinieritas
Transparansi Publik (X2)	0,899	1,112	Tidak Multikolinieritas
Aktivitas Pengendalian (X3)	0,884	1,131	Tidak Multikolinieritas

Sumber: Penulis (2017)

Berdasarkan pengujian Multikolineasritas yang dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena tidak ada nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1.

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 3 Grafik Scatterplot**

Dari grafik Scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi



## Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.313	6.317		2.583	.014
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.161	.180	.161	.894	.377
	Transparansi Publik	-.127	.210	-.103	-.605	.549
	Aktivitas Pengendalian	.203	.234	.148	.864	.393

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Penulis (2017)

Hasil perhitungan pada tabel 4. (*coefficients*) diperoleh nilai persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  $Y = 16,313 + 0,161X_1 - 0,127X_2 + 0,203X_3$

Dimana:

- Y = Akuntabilitas Keuangan
- X1 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- X2 = Transparansi Publik
- X3 = Aktivitas Pengendalian

Koefisien regresi pada variabel Sistem Keuangan Daerah berarah positif dan signifikan sebesar 0,161, hal ini berarti jika variabel Sistem Keuangan Daerah berarah bertambah satu satuan maka variabel Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan berkurang sebanyak 0,161 satuan atau sebesar 16,1%. Koefisien regresi pada variabel Transparansi Publik berarah negatif dan signifikan sebesar - 0,127, hal ini berarti jika variabel Transparansi Publik bertambah satu satuan maka variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan bertambah sebesar - 0,127 satuan atau sebesar 12,7%. Koefisien regresi pada variabel Aktivitas Pengendalian berarah positif dan signifikan sebesar 0,203, hal ini berarti jika variabel Aktivitas Pengendalian bertambah satu satuan maka variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan bertambah sebesar 0,203 satuan atau 20,3%.

## Hasil Uji Hipotesis Penelitian

### Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05.

**Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.313	6.317		2.583	.014		
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.161	.180	.161	.894	.377	.800	1.250
	Transparansi Publik	-.127	.210	-.103	-.605	.549	.899	1.112
	Aktivitas Pengendalian	.203	.234	.148	.864	.393	.884	1.131

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Penulis (2017)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan:

- 1) Pengujian Hipotesis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan.  
Nilai signifikan variabel Sistem Akuntansi Daerah sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel ini lebih besar dari 0,05. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis akan diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak yang berarti penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
- 2) Pengujian Hipotesis Pengaruh Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan.  
Nilai signifikansi variabel Transparansi Publik sebesar 0,549. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi variabel Transparansi Publik lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak yang berarti keahlian Transparansi Publik tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan
- 3) Pengujian Hipotesis Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan.  
Nilai signifikansi variabel Aktivitas Pengendalian sebesar 0,393, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan hipotesis 3 juga ditolak yang berarti bahwa Aktivitas Pengendalian tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Menurut Sugiyono (2012) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0.0 – 0.199 = Sangat Rendah

0.20 – 0.399 = Rendah

0.40 – 0.599 = Sedang

0.60 – 0.799 = Kuat

0.80 – 1.000 = Sangat Kuat

Hasil uji analisis determinasi ini dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6 Hasil Uji Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.249 <sup>a</sup>	.062	-.016	2.38836

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Penulis (2017)

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*). Berdasarkan tabel model *summary* di atas diperoleh nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,249. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,062 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah – 0,016. Hal ini berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian hanya mampu menjelaskan variasi dari Akuntabilitas Keuangan sebesar 1,6%. Sedangkan sisanya (100% - 1,6% = 99,4 %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Ada banyak variabel yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan

Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan dilihat berdasarkan nilai signifikan lebih dari 0,05 Hal ini membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah harus

lebih ditingkatkan lagi, karena Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal lain yang menunjukkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang optimal. Berdasarkan data jawaban responden, proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan sudah seluruhnya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang. Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai, maka dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nurhayati Soleha (2014) yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan.

### **Pengaruh Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan. Pada kenyataannya, berdasarkan hasil pengumpulan kuisioner, transparansi masih sulit dilakukan, sehingga kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut masih terbatas.

Transparansi atau keterbukaan masih menjadi suatu yang mahal, apalagi yang menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa keuangan yang membutuhkan informasi tersebut, seperti mahasiswa yang melakukan penelitian yang memerlukan data-data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal pada dasarnya keuangan daerah adalah dana publik yang setiap anggota masyarakat berhak mengetahuinya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian indah (2014) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara Transparansi Publik dengan Akuntabilitas Keuangan.

### **Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh antara Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh antara Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan. Aktivitas Pengendalian seharusnya efektif dan efisien, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, ketaatan atau kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah diolah, ternyata masih banyak oknum-oknum yang tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Banyak staf atau pegawai yang melakukan hal lain diluar fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Selama ini tidak ada peraturan atau sanksi yang tegas sebagai pengendalian para staff dan pegawai untuk bekerja lebih efektif, efisien dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab yang diberikan.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian soleha (2014) yang menunjukkan adanya hubungan antara Aktivitas Pengendalian dengan Akuntabilitas Keuangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) di Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.
2. Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan.
3. Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

## Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen lain yang dapat menjelaskan variabel dependen, sehingga nilai *adjusted R<sup>2</sup>* menjadi lebih besar.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengikutsertakan lebih banyak responden yang terkait dan tidak hanya memenuhi jumlah minimal yang dapat diterima agar hasil penelitian lebih menyeluruh.
3. Data penelitian berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrument kuisioner, mungkin mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan sesungguhnya, mungkin akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Fitri, Lestari. 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/Penanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Pemerintah Kabupaten Lingga)*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan penerbit-UNDIP.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ida, Bagus Pujiswara. Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)*. Kabupaten Klungkung: E-Jurnal S-1 Akuntansi. Volume 2 No.1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Indah, Windrastuti. Rahardjo, Adisasmitha. R.A Damayanti. 2014. *Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros*. Kabupaten Moras: Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Lind, Douglas A. William G marchal. Samuel A Wathen. 2007. *Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV*. Yogyakarta: Andi, Offset.
- Mulyono, Imam. 2012. *Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam rangka Peningkatan transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Malang: Skripsi Politeknik Negeri.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. <http://fafaahmad.wordpress.com>.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

<http://fafaahmad.wordpress.com>

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.

<http://fafaahmad.wordpress.com>

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Accrual*. <http://fafaahmad.wordpress.com>

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

<http://fafaahmad.wordpress.com>

Republik Indonesia.2005. *Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.<http://fafaahmad.wordpress.com>

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <http://fafaahmad.wordpress.com>

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. <http://fafaahmad.wordpress.com>

Soleha, Nurhayati. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten*. Banten: Jurnal Ekonomi Volume 13 No. 1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sukhemi.2010. *Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Universitas PGRI.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah : Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: ALPABETA.

Saputra, Iskandar. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Di Kabupaten Bintan*. Tanjung Pinang: *Skripsi* Universitas Maritim Raja Ali Haji.